



Afan Gaffar

## **Kepeloporan Pemuda dan Tantangan Dalam Menghadapi Perubahan Sosial di Indonesia**

### **I. PENGANTAR**

Ketika Ir. Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927 umurnya baru 26 tahun. Soekarno yang masih amat muda sudah mampu merumuskan dengan jelas visi sosial dan visi politiknya tentang bangsanya. Mau ke mana masyarakat Indonesia hendak di bawa dengan platform politik dari partai tersebut, yang kemudian ia ungkap dengan sangat sederhana sebagai masyarakat yang "Marhaenisme." Apapun yang dikemukakan oleh Soekarno tentang Marhaenisme serta kritikan orang terhadap ideologi yang telah dikembangkannya kenyataannya Soekarno telah berhasil merumuskan visinya dengan jelas dan gamblang. Kemudian ketika harus berhadapan dengan "Landraad" Bandung Soekarno juga sudah mampu menganalisis dengan sangat baik bahwa pada pertengahan tahun 1940an akan terjadi perang pasifik dan pada kesempatan

itulah kemerdekaan bagi bangsanya akan dikumandangkan.<sup>2</sup>

Pada waktu menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, 1945, umurnya sudah menginjak 44 tahun. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah politik kita, sebelum proklamasi kemerdekaan dinyatakan, terjadi perdebatan yang hangat antara Soekarno-Hatta di satu pihak dengan kelompok pemuda yang dipelopori oleh Sutan Syahrir, Adam Malik, dan kawan-kawannya yang menyangkut masalah waktu dan hal-hal teknis pernyataan kemerdekaan, perdebatan yang berakhir dengan "diculiknya" kedua tokoh tersebut oleh Pemuda ke Rengasdengklok.

Sekembalinya dari Rengasdengklok Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Kedua bapak bangsa tersebut sudah dianggap orang tua, Syahrir dan kawan-kawannya masuk dalam kategori "pemuda".

Akan tetapi "kepemudaan" Syahrir tidaklah berlangsung lama karena beliau yang kemudian menjadi pelopor utama dari demokrasi parlementer di Indonesia, dan merupakan Perdana Menteri Termuda dalam sejarah executive di Asia Tenggara. Syahrir kemudian menjadi tokoh "tua" sekalipun umurnya belum mencapai pertengahan tigapuluhan. Syahrir merupakan figur yang sangat menonjol dalam politik pasca-kemerdekaan bahkan dia menjadi sangat legendaris sebagai pelopor Partai Sosialis Indonesia dengan pikiran-pikiran yang tajam bagaimana bangsanya dan mau dibawa kemana dengan sosialismenya.

Tulisan ini mencoba mengungkapkan kepeloporan pemuda dan tantangan yang dihadapi dalam masa-masa mendatang, terutama dalam menghadapi era globalisasi yang sekarang menjadi bahan pembicaraan banyak orang di Indonesia. Di dalam tulisan ini saya mencoba mengajak pembaca untuk mengulas sedikit tentang apa yang kita maksudkan sebagai pemuda, bagaimana peranan mereka secara historis, bagaimana kecenderungan-kecenderungan yang sedang berlangsung, tantangan-tantangan apa yang kita hadapi, serta bagaimana posisi pemuda dalam menghadapi persoalan tersebut. Tulisan ini diharapkan mampu memancing diskusi yang serius diantara kita semua pada hari ini.

## II. KONSEP KEPEMUDAAN

Masalah kepemudaan dan betapa pentingnya peranan pemuda dalam suatu masyarakat sudah sering di-

ungkapkan oleh pelbagai pihak. "Pemuda harapan bangsa," "Pemuda pemegang tongkat kepemimpinan masa depan," Pemuda . . . . .," dstnya merupakan ekspresi yang sudah sangat umum kita kenal sekalipun bersifat sloganistik.

Kepemudaan dapat ditinjau dari pelbagai macam dimensi, termasuk di dalamnya dimensi demografis, sosiologis, psikologis, historis dan politik, apalagi dalam setiap kancah perubahan pemuda memang selalu berada pada posisi yang unik. Akan tetapi sebenarnya sangatlah sulit untuk memberikan definisi dengan tepat dan jelas apa yang kita maksudkan dengan pemuda, siapa yang kita dapat kelompokkan sebagai orang muda. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa tidak jarang orang yang sudah berumur masih banyak menangani masalah kepemudaan, atau yang dianggap menjadi tokoh kepemudaan sebenarnya orang-orang yang sudah memasuki umur dalam kategori orang tua.

Secara demografis pemuda selamanya dianggap sebagai kumpulan angka-angka saja. Umumnya yang masuk dalam kategori orang muda oleh kalangan demografer adalah mereka yang berumur antara 10 sampai dengan 34 tahun. Dari segi jumlahnya mereka menempati proporsi yang sangat subsransil dibandingkan dengan kategori atau kelompok orang tua dan anak-anak. Angka statistik pada tahun 1985, misalnya, dari 164 juta penduduk Indonesia, hampir separuhnya masuk dalam kategori orang muda, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini.

Kel. Umur	Pedesaan	Perkotaan	Total
10-14 th	15.795.119	5.101.456	20.896.575
15-19 th	11.367.853	5.199.117	16.586.970
20-24 th	9.633.424	4.654.233	14.287.657
25-29 th	9.844.899	3.964.711	13.809.610
30-34 th	7.733.144	2.925.957	10.659.101

**Catatan :** Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1985 adalah 164 juta jiwa, yang masuk kategori umur muda adalah sekitar 76 juta jiwa, **Sumber:** Statistik Indonesia, 1987, Biro Pusat Statistik, Jakarta.

Dari informasi ini kita dapat melihat dengan jelas proporsi penduduk yang masuk dalam kategori orang muda, yang tentu saja mempunyai makna yang sangat strategis karena berkaitan dengan sejumlah permasalahan yang melekat padanya, termasuk di dalamnya adalah masalah penyediaan lapangan kerja, penyediaan sarana atau fasilitas pendidikan, aktifitas sosial, olah raga, politik, dan lain sebagainya.

Secara sosiologis kepemudaan mempunyai makna yang tersendiri pula. Pada konsep kepemudaan akan muncul sejumlah persoalan yang berkaitan dengan suatu sub-kulture sendiri yang pada akhirnya berhubungan erat dengan masalah sosial dan politik, seperti misalnya pemuda selalu memperlihatkan dirinya untuk menolak sesuatu yang mapan atau "anti-establishment", counter culture, dan sudah umum dikenal pemuda yang selalu menunjukkan sikap yang "rebellious".

Akan tetapi yang sangat umum dikenal di Indonesia adalah kepemudaan selalu dikaitkan dengan dimensi historis dan politik. Pengertian

atau konsep generasi dan angkatan yang kita kenal selama ini adalah konsep yang mengandung makna historik dan politik, seperti misalnya Generasi 1928, Generasi 1945, Generasi 1966, dan seterusnya. Pengelompokan atas dasar kategori timbul karena pada masa-masa tersebut generasi muda memperlihatkan dirinya memainkan peranan politik yang sangat penting dalam sejarah kehidupan di Indonesia yang menjadi catatan emas dalam sejarah bangsa kita.

Generasi atau angkatan '28 merupakan angkatan yang pertama sekali yang menyatakan dengan jelas adanya dan akan dibentuknya satu "nation-state" yang bernama Indonesia dengan Ikrar Sumpah Pemuda yang telah dilakukannya. Generasi atau angkatan '45 merupakan generasi yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang membentuk satu nation state yang bernama Indonesia, sedangkan generasi atau angkatan '66 merupakan generasi yang muncul untuk menegakkan kembali keadilan dan kebenaran dan mencoba melak-

sanakan UUD'45 secara murni dan konsekwen.

Dengan demikian terbentuklah apa yang disebut mitos betapa besar peranan orang muda atau pemuda pada setiap momentum politik yang kritis di Indonesia. Pemuda seolah memiliki semacam "mission" untuk selalu muncul pada setiap momentum politik yang kritis, sehingga kemudian tercipta "sell-image" bahwa pemuda memiliki semacam "noblesse oblige" untuk selalu muncul di garis yang terdepan pada suatu saat yang sangat kritis.

Konsekwensinya timbul apa yang kita kenal kesadaran historik yang dimiliki oleh kalangan pemuda yang setiap generasi ingin memiliki sesuatu yang unik pada jamannya. Generasi yang sekarang ingin menyumbangkan "sesuatu yang lain" dari generasi sebelumnya karena kesadaran sejarah yang dimilikinya. Kalau tidak demikian mereka seakan-akan takut akan dikutuk sebagai pengekor atau epigon dari generasi sebelumnya. Taufik Abdullah dengan sangat menarik menjelaskan hal ini ketika dia mengutip sosiolog yang sangat ternama, Max Weber, sebagai berikut :

"Generasi kita tak begitu beruntung untuk mengetahui apakah perjuangannya kelak akan mendatangkan hasil (seperti yang dicapai generasi terdahulu) dan apakah keturunan kita akan mengakui kita sebagai nenek moyang mereka. Kita tak akan berhasil menghapuskan kutukan yang terlontar kepada kita,

sebagai pengekor dari suatu era politik yang besar, kecuali jika kita berhasil untuk menjadi sesuatu yang lain-pendahulu dari jaman yang lebih besar. Apakah ini yang akan menjadi tempat kita dalam sejarah? Saya tak tahu dan hanya bisa mengatakan : Adalah hak pemuda untuk jujur pada dirinya dan pada cita-citanya." (Taufik Abdullah, 1974, p.5).

Dengan demikian generasi muda pada jamannya akan memiliki sindrom untuk membuat sesuatu yang lain sehingga tidak dapat dituduh sebagai epigon generasi sebelumnya.

Sekali lagi saya mengutip apa yang diungkapkan oleh Taufik Abdullah yang menggambarkan suasana psikolog generasi muda dan permasalahan yang dihadapi mereka. "Pergerakan kemerdekaan dan perjuangan merebut kemerdekaan di tanah air kita adalah peristiwa-peristiwa besar dan agung yang membanggakan, namun sekaligus juga menghimpit kesadaran sejarah generasi yang kemudian.

Apakah kami hanya pemikul batu bagi bangunan yang telah selesai atautkah kami berhak membangun yang baru yang lebih sesuai ..... apakah gedung tersebut betul-betul telah selesai ?", kata Taufik Abdullah dengan tepat sekali.

Konsep kepemudaan di Indonesia dengan demikian bukanlah semata-mata konsep yang demografis karena mereka bukan sekedar angka belaka, konsep kepemudaan adalah konsep historis dan politik.

### III. KONDISI OBYEKTIF ORGANISASI KEPEMUDAAN MASA SEKARANG

Karena konsep kepemudaan yang kita kenal sekarang lebih merupakan konsep historis dan politik, maka sejak memasuki era akhir 1970an masalah kepemudaan ditata dengan serius oleh pemerintah. Pemerintah sadar betul akan potensi politik generasi muda sehingga perlu diadakan akomodasi terhadap mereka, seperti misalnya dengan diadakannya Menteri Muda Olah Raga dan Pemuda yang kemudian ditingkatkan lagi menjadi Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga. Jauh sebelum itu pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terdapat sesuatu Direktorat yang khusus mengamani masalah kepemudaan.

Tampaknya, pada masa pemerintahan Orde Baru ini birokrasi memainkan peranan yang sangat penting di dalam membina dan menata kembali organisasi kepemudaan di Indonesia. Demikian juga lembaga-lembaga yang berada di luar birokrasi akan tetapi mempunyai kaitan secara tidak langsung dengan birokrasi itu sendiri. Oleh karena itu kalau kita melihat pengelompokan generasi muda pada saat sekarang ini, maka kita dapat mengelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang secara garis besar adalah sebagai berikut.

Kelompok yang **pertama** adalah generasi kepemudaan yang dibentuk dari atas, dengan mendapat dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan birokrasi. Inisiatif pembentukannya lebih banyak berasal

dari kalangan birokrasi demikian juga pembinaannya sangat bergantung kepada besar kecilnya dukungan birokrasinya, misalnya biaya operasional kegiatannya, termasuk biaya untuk mengadakan kongres, musyawarah, simposium dan seminar. Termasuk dalam kategori ini adalah KNPI, AMPI dan FKPPI.

Kelompok organisasi kepemudaan dalam kategori ini merupakan salah satu pilar penopang pemerintah yang sangat kokoh, yang sebagai imbalannya pemerintah juga menyediakan "reward" yang cukup pantas, misalnya ada yang diberi tempat dalam Lembaga Perwakilan Rakyat baik pada tingkat Nasional maupun pada tingkat Lokal. Mereka adalah kelompok yang saya namakan "in-group" artinya kelompok pendukung pemerintah yang sangat kuat. Akan tetapi salah satu konsekuensinya dari hubungan timbal balik antara organisasi kepemudaan seperti ini dengan birokrasi adalah otonomi organisasi ini menjadi berkurang, mereka tidak begitu leluasa menunjukkan sikap yang kritis kalau sudah berhadapan dengan pemerintah. Menurut pengamatan saya, mereka yang termasuk dalam kelompok ini menerima kemapanan sebagai sesuatu yang wajar bahkan mempunyai kecenderungan untuk bersikap konservatif karena mencoba mempertahankan statusnya yang ada.

Gejala yang lain yang menonjol dari organisasi kepemudaan adalah gejala kecenderungan untuk kembali kepada pola politik lama yang terjadi pada masa pasca kemerdekaan dan masa Demokrasi Terpimpin. Sebagaimana

kita ketahui, organisasi pemuda (termasuk organisasi kemahasiswaan) tidaklah merupakan organisasi yang berdiri sendiri, akan tetapi bernaung ke dalam salah satu partai politik.

Pemuda Marhaen berafiliasi dengan PNI, Pemuda Rakyat dengan PKI, GPII dengan Masyumi, GP Ansor dengan Partai NU, Pemuda Katolik dengan Partai Katolik, dan lain sebagainya. Organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan merupakan instrument politik yang sangat vital bagi partai-partai politik dalam rangka pembentukan kekuatan politik dengan mengerahkan massa yang kuat pada suatu momentum tertentu. Gejala tersebut dapat kita temukan lagi pada saat sekarang ini, di mana setiap partai politik membentuk organisasi kepemudaan, seperti misalnya Pemuda Persatuan yang berafiliasi dengan PPP; Pemuda Pancasila, Pemuda Kasgoro, AMPI, KNPI, dan FKPPi dengan Golongan Karya.

Bentuk afiliasi semacam ini tentu saja mempunyai konsekuensi tersendiri pula seperti misalnya melemahnya otonomi organisasi dan berkurangnya sikap yang kritis dari mereka karena sudah sedikit banyak diwarnai pola hubungan yang didasarkan atas interest tertentu. Saya mengelompokkan organisasi kepemudaan seperti ini dalam kelompok yang kedua.

Kelompok yang ketiga adalah kelompok organisasi kepemudaan yang bersifat independent. Mereka pada umumnya mempunyai tingkat independensi yang sangat tinggi dan selalu memperlihatkan dirinya dengan sangat kritis kalau sudah berhadapan

dengan birokrasi. Organisasi kemahasiswaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Group Diskusi, dan lain-lainnya dapat dimasukkan ke dalam kelompok yang ketiga ini.

Saya tidak dapat memberikan judgment apakah yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan yang saya masukkan dalam ketiga kategori di atas sudah benar atau salah, sudah baik atau tidak baik, saya hanya menatap dari kacamata seorang yang mempunyai minat untuk memahami hal tersebut di atas.

#### **IV. AGENDA POLITIK MASA SEKARANG**

Kalau saya dapat mengatakan bahwa Pemuda ibarat gadis cantik yang diminati oleh banyak pihak karena posisi mereka yang sangat strategik disamping jumlahnya yang besar secara demografik. apalagi Pemilihan Umum sudah semakin dekat.<sup>3</sup> Di samping itu sejumlah tantangan bermunculan dihadapan kita dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga bagaimanapun juga hukum alam bahwa siapa yang kuat, siapa yang lihai dan mampu beradaptasi serta berkompetisi dalam era globalisasi seperti sekarang ini maka merekalah yang akan unggul dalam setiap percaturan politik.

Masyarakat kita menjadi semakin kompleks sebagai akibat dari proses pembangunan yang berjalan selama lebih dari dua dekade ini. Pada saat sekarang ini kita memasuki era transisi menuju masyarakat yang industrial sekalipun karakteristik masyarakat yang tradisional tidak dapat kita tinggalkan

sama sekali. Dengan adanya arus globalisasinya sejumlah kecenderungan-kecenderungan baru mau tidak mau akan kita hadapi. John Naisbitt (1981) mengemukakan ada sepuluh kecenderungan yang akan kita hadapi, yaitu :

- Industrial society -- Information Society
- Forced Technology ----- High Tech/High Touch
- National Economy ----- World Economy
- Short Term ----- Long Term
- Centralization ----- Decentralization
- Institutional help ----- Self help
- Reoesentative Democracy ----- Participatory Democracy
- Hierachies ----- Networking
- North ----- South
- Either/Or ----- Multiple Option

Kalau kita mengkaji kecenderungan-kecenderungan seperti yang dikemukakan Naisbitt di atas maka tantangan yang kita hadapi akan semakin berat karena menyangkut masalah survival kita sendiri baik sebagai bangsa maupun sebagai warga negara. Siapa yang mampu meningkatkan kualitas dirinya tentu saja akan mempunyai peluang yang lebih besar dari pada mereka yang tidak cepat melakukan adaptasi karena kekuatan otot diganti dengan kekuatan otak yang disertai dengan kecepatan, ketepatan, dan ketelitian yang sangat tinggi.

Bagaimana dengan agenda politik di Indonesia? Ada beberapa hal yang menurut pendapat saya perlu kita antisipasi dan generai muda harus dapat segera menempatkan dirinya dan waspada dalam mengantisipasi masalah-masalah yang akan muncul.

Dalam waktu lebih kurang sembilan bulan lagi kita akan melaksanakan pemungutan suara untuk melaksanakan Pemilihan Umum. Seperti biasanya "suhu politik" akan semakin memanas karena sejumlah kemungkinan agenda politik akan dimunculkan sebagai issue sentral dengan lebih instensif lagi oleh sementara kalangan. Kalau saya mencoba mengantisipasi permasalahan yang akan dimunculkan sebagai agenda politik yang akan segera kita hadapi, saya memperkirakan paling tidak ada empat (4) persoalan pokok yang akan dimunculkan, yaitu :

**1). Masalah Keterbukaan/Demokrasi**

Masalah ini sudah mulai muncul sejak akhir tahun 1989 dan mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat dan pemerintah sendiri. Menurut hemat saya pemerintah sudah semakin bijaksana dalam menghadapi masalah ini sekalipun di daerah masih belum sepenuhnya memperoleh tanggapan yang secukupnya, seperti dicekalnya orang-orang tertentu di Jawa Tengah ini, misalnya.

Demokratisasi sebagai salah satu issue sentral yang akan dimunculkan sebenarnya merupakan konsekuensi yang sangat logis dari perubahan sosial yang kita alami selama tiga dekade terakhir ini. Kita tidak dapat menutup

---

*1) Dosen Pascu Sarjana Fisipol, Universitas Gadjah Mada, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan-Fisipol, Universitas Gadjah Mada, dan Pembantu Rektor I, Universitas Islam Indonesia. Apa yang diungkapkan dalam tulisan ini merupakan pendapat pribadi, sehingga tidak mencerminkan atau mempresentasikan pendapat lembaga di mana penulis bekerja.*

mata atas keberhasilan kita dalam bidang ekonomi, masyarakat semakin sejahtera, tingkat pendidikan semakin maju, kemampuan baca tulis semakin meningkat, pendapatan perkapita semakin mantap, tingkat urbanisasi semakin tinggi, serta semakin banyaknya peranan mass media yang ada dalam masyarakat kita. Secara politik hal ini membawa dampak yang sangat besar, karena dengan demikian proposi orang yang semakin mampu berpolitik menjadi lebih banyak, kesadaran politik masyarakat semakin meningkat, yang pada akhirnya tuntutan politik akan semakin banyak dengan tingkat intensitas yang tinggi. Masyarakat kita dan pemerintah sudah sewajarnya mengantisipasi dengan kebijaksanaan dan sadar sekali atas persoalan ini karena tidak mungkin kita akan menyambut terus arus yang berasal dari bawah. Pengalaman yang terjadi di Eropa Timur menunjukkan bahwa masyarakat tersebut secara ekonomi dan teknologi telah mengalami proses perubahan yang sangat fundamental, sehingga dampaknya dalam bidang politik besar sekali sementara itu para penguasanya tidak mampu mengantisipasi perubahan-perubahan itu dengan bijak maka konsekwensinya adalah gelombang perubahan yang sangat mendasar. Pada tahun 1970an dan 1980an tiak dapat kita bayangkan hal itu akan terjadi sekalipun gejala-gejala ke arah itu sudah mulai ada, seperti misalnya munculnya kekuatan pekerja di Polandia.

Akan tetapi menurut hemat saya, kalangan muda sudah seharusnya tidak terjebak oleh demokratisasi yang

bersifat sloganistik dan sangat liberalistik, karena demokrasi seperti yang dipraktekkan di Amerika dan Eropa Barat masih belum pantas untuk kita praktekkan di Indonesia. Demokrasi adalah demokrasi akan tetapi bagaimana melaksanakannya akan sangat bergantung kepada kondisi yang realistik ada pada suatu masyarakat.

2). Persoalan kedua yang akan muncul menjadi isu sentral dalam memasuki Pemilihan Umum dan Sidang UMUM Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah masalah **pertanahan**. Tanah mempunyai nilai emosional yang sangat tinggi sekali dalam masyarakat kita karenanya orang biasanya sulit untuk melepaskan diri dari tanah dimana ia dilahirkan dan dibesarkan, apalagi kalau tanah itu merupakan satu-satunya sumber kehidupannya. Persoalan yang paling sering kita dengan yang berkaitan dengan masalah pertanahan ini adalah ketidakwajaran dalam besarnya ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena elemen musyawarah dengan masyarakat masih terbatas sehingga tidak jarang terjadi surprised. Demikian juga dengan definisi tentang pemilikan atau hak atas tanah tersebut yang belum jelas.

Kalau suatu masyarakat telah menerima warisan atas tanah secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan proses tersebut biasanya tidak dibarengi dengan pembenahan administrasi keluarga,

---

2) *Pidatonya di Landraan Bandung terkenal dengan judul "Indonesia Menggugat".*

dan pada suatu waktu mereka diminta untuk membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan hak milik mereka, masyarakat kita akan selalu lemah kalau berhadapan dengan masalah ini, hal ini berkaitan erat dengan definisi pemilikan yang belum jelas. Apa yang terjadi di Riau saat sekarang ini merupakan salah satu contoh yang jelas sekali, dan tidak mustahil akan kita temukan hal yang sama di tempat lainnya. Di Jawa, persoalan tanah menjadi lebih rumit karena merupakan salah persoalan yang sangat tinggi dimensi politiknya karena proposi pembangunan masih sangat besar berada di Jawa dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi.

### 3). Keadilan Sosial (Pri-NonPri).

Pembangunan yang sudah dijalan sejak Repelita I, seperti yang dikemukakan sebelumnya, sudah membawa kita kepada perubahan perbahan yang bersifat fundamental dalam bidang ekonomi, akan tetapi dimensi lain dari masalah pembangunan yang biasanya muncul adalah masalah **distribusi**, siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana. Sudah banyak dikaji oleh kalangan ilmuwan bahwa terjadi pola hubungan yang bersifat "clientilistic" antara penguasa dan pengusaha, bahkan tidak jarang terjadi hubungan tersebut tidak hanya clientilistic akan tetapi juga hubungan yang seimbang hanya saja siapa yang menjadi clientnya siapa sulit untuk ditentukan (Yahya Muhaimin, 1990, Robinson, 1985).

Dengan pola hubungan yang seperti

ini terdapat sekelompok orang yang memperoleh keuntungan yang sangat berlebihan dengan penumpukan dan mobilisasi modal yang sangat tinggi.

Orang-orang tersebut adalah pengusaha pribumi yang dekat dengan pejabat, dan yang lebih banyak lagi adalah yang berasal dari kalangan non pribumi.

Saya sama sekali tidak bermaksud mempertajam masalah ini dalam diskusi ini, akan tetapi saya mencoba menangkap kenyataan yang ada dalam masyarakat kita yang saya perkirakan akan diangkat menjadi salah satu isu sentral dalam konstelasi politik memasuki Pemilihan Umum dan Sidang Umum MPR yang akan datang. Pemerintah sudah mulai mencoba mengantisipasi masalah ini dengan serius seperti misalnya Presiden Soeharto menghimbau agar sejumlah pengusaha kaya memberikan sahamnya kepada koperasi. Akan tetapi sudah banyak diungkapkan pula bahwa himbuan Presiden tersebut belum mendapat sambutan yang wajar dari kalangan pengusaha.

---

*3) Kalau Pemilihan Umum itu sendiri menurut hemat saya tidak membawa dampak perubahan yang fundamental. Golongan Karya, dengan segala dana dan daya yang dimilikinya, dengan dukungan kuat dari Angkatan Bersenjata beserta jajarannya, Birokrasi, dan organisasi massa, maka tidak akan sulit bagi Golkar untuk memenangkan Pemilu seperti yang ditargetkannya, paling tidak hasil yang akan diperoleh akan sama dengan hasil Pemilu sebelumnya, sementara itu partai politik yang lain akan sangat sulit muncul sebagai kekuatan alternatif.*

#### 4). Pemilihan Presiden/Suksesi.

Pada setiap menjelang Sidang MPR masalah ini akan selalu menjadi topik pembicaraan yang hangat di kalangan masyarakat, terutama kalangan politisi, akademisi dan intelektual. "Siapa yang akan menjadi Wakil Presiden?," kira-kira demikian yang menjadi pertanyaan masyarakat. Pengalaman yang sudah-sudah selalu menunjukkan kecenderungan yang sama, sehingga sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa apa yang saya kemukakan ini bukan mengada-ada akan tetapi hal itu yang saya tangkap dari masyarakat.

Hal ini terjadi konsekwensi dari pola rekrutmen politik kita yang masih tertutup,<sup>4</sup> sehingga tidak diketahui dengan jelas prospek pengisian jabatan kalau pada suatu waktu terdapat jabatan yang lowong, baik itu jabatan Kepresiden, Gubernur, maupun Bupati/Walikota/madya.

#### V. PENUTUP.

Apa yang saya kemukakan di atas adalah persoalan yang saya tangkap yang akan muncul atau dimunculkan ketika memasuki Pemilihan Umum maupun Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tentu saja generasi muda harus waspada dan arif menghadapi persoalan atau isu yang dimunculkan, tidak menanggapi dengan cara yang emosional, karena harus disertai dengan nalar yang sehat dan kepala yang dingin.

---

4) Dalam ilmu politik dikenal dua model pola rekrutmen yang umum dilakukan pada suatu negara, yaitu pola rekrutmen yang tertutup dengan tingkat kompetisi yang masih sangat rendah, dan pola rekrutmen yang terbuka dimana setiap orang yang memenuhi syarat tertentu mempunyai peluang yang sama untuk mengisi suatu jabatan politik yang tersedia.